



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP 10 (SEPULUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)
TENTANG KABUPATEN/KOTA**

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI

Kamis, 24 Juli 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua;

Om Swastyastu;

Namo Buddhaya;

Salam Kebajikan.

Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI;

Pimpinan Komite I DPD RI;

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional RI;**

Menteri Hukum RI; serta

Hadirin yang Saya Hormati.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan perlindungan serta bimbingan-Nya kita dapat mengikuti agenda Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat II (dua) atas 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang sesuai **Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B/10683/LG.01.03/7/2025 tanggal 23 Juli 2025** hal **Undangan Rapat Paripurna DPR-RI** dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang Saya muliakan,

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya, serta berdasarkan Surat dari Ketua DPR RI Nomor B/4343/LG.01.01/13/2025 pada tanggal 20 Maret 2025 kepada Bapak Presiden perihal Penyampaian 10 (sepuluh) RUU Provinsi usul DPR RI, Bapak Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden Nomor R-33/Pres/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas 10 (sepuluh) RUU Kabupaten/Kota Usul DPR-RI.

Dalam surat Presiden dimaksud, Bapak Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas 10 (sepuluh) RUU Kabupaten/Kota Usul DPR-

RI, yang meliputi: 1) RUU tentang **Kabupaten Gorontalo** di Provinsi Gorontalo; 2) RUU tentang **Kota Gorontalo** di Provinsi Gorontalo; 3) RUU tentang **Kabupaten Buton** di Provinsi Sulawesi Tenggara; 4) RUU tentang **Kabupaten Kolaka** di Provinsi Sulawesi Tenggara; 5) RUU tentang **Kabupaten Konawe** di Provinsi Sulawesi Tenggara; 6) RUU tentang **Kabupaten Muna** di Provinsi Sulawesi Tenggara; 7) RUU tentang **Kabupaten Bolaang Mongondow** di Provinsi Sulawesi Utara; 8) RUU tentang **Kabupaten Sangihe** di Provinsi Sulawesi Utara; 9) RUU tentang **Kabupaten Minahasa** di Provinsi Sulawesi Utara; dan 10) RUU tentang **Kota Manado** di Provinsi Sulawesi Utara.

Penyusunan 10 (sepuluh) RUU Kabupaten/Kota ini merupakan bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, proses penyusunan kesepuluh RUU ini juga berlangsung efektif dan efisien dengan tetap mengikuti semua tahapan sesuai aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR-RI yang dilengkapi dengan Naskah Akademik yang sistematis dan draft RUU yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum yang berlaku merupakan prestasi tersendiri dari DPR-RI. Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum diantara Komisi II DPR-RI, Tim Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), Pemerintah, dan Komite I DPD-RI. Meskipun terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat, namun semua perbedaan hampir semuanya dapat dicapai titik kesepakatan.

Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang Saya muliakan,

Akhirnya sekali lagi atas nama Pemerintah kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan 10 (sepuluh) RUU Kabupaten/Kota sehingga dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, petunjuk, dan pertolongan-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

**Sekian dan terima kasih,
*Wabillahittaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Jakarta, 24 Juli 2025,
MENTERI DALAM NEGERI**